



KERJASAMA
Suasana penandatanganan MoU antara PLN dengan SGCC serempak dengan perusahaan lain di hadapan Presiden Joko Widodo pada Indonesia-China Business Forum di Beijing. (ist)

DISAKSIKAN PRESIDEN JOKOWI PADA ICBF CHINA 2023

PLN Sepakati Kerjasama dengan 9 Perusahaan

BEIJING - Di sela-sela kunjungan kerja Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) bertemu Presiden China, Xi Jinping, 15-18 Oktober 2023, Presiden RI menyaksikan kesepakatan kerjasama PT PLN (Persero) dengan dua perusahaan besar energi bersih asal China dalam kerja sama pengembangan EBT di Indonesia pada Indonesia-China Business Forum (ICBF) di Beijing, China.

Selain dua MoU yang disaksikan Presiden Jokowi, PLN juga meneken tujuh MoU lainnya antara lain dengan The Export-Import Bank of China, Sinosure, Bank of China, Industrial and Commercial Bank of China, State Development & Investment Corp. Ltd, Huawei Tech Investment, dan China Energy International Group dengan total nilai valuasi kerja sama (termasuk pendanaan) sebesar lebih dari 54 miliar USD.

sebagai backbone kelistrikan energi bersih di Indonesia.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, yang juga mendampingi Presiden Jokowi di forum China-Indonesia Business Forum 2023 di Beijing, mengatakan PLN merasa terhormat dengan kolaborasi bersama perusahaan-perusahaan energi kelas dunia yang ada di China. Dengan adanya forum ini, dirinya melihat partnership antarpihak akan semakin kuat.

Darmawan mengatakan, kerja sama dengan SGCC merupakan wujud kolaborasi bersama untuk dapat bergerak maju dalam transisi energi.

"PLN berharap melalui kerja sama ini, SGCC dan PLN dapat saling memperkuat satu sama lain. Bersama-sama, kita akan membangun jalur transmisi supergrid ramah lingkungan, smart grid, dan memperluas kemitraan ke depan," ujar Darmawan.

Nantinya, kerja sama antara PLN dan SGCC juga mencakup studi bersama dalam pemanfaatan energi terbarukan, penyimpanan tenaga listrik, integrasi jaringan listrik hingga manajemen jaringan cerdas untuk meningkatkan sistem tenaga listrik yang andal, berkualitas dan ekonomis.

Tidak hanya dengan SGCC, kerja sama PLN juga dilakukan dengan investor asal China lainnya, yaitu Trina Solar. PLN melalui PLN Indonesia Power Renewables melakukan joint venture dengan Trina Solar, Sinar Mas, dan Agra Surya Energi untuk pembangunan pabrik sel dan panel surya terbesar se-Indonesia di Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah.

"Trina Solar ini perusahaan terkemuka dengan teknologi masa depan. Bersama-sama, kami telah meluncurkan joint venture manufaktur Solar PV. Kami akan memperluas

kapasitas dan produksi untuk memasok pasar Solar PV skala besar di Indonesia," ujarnya.

Darmawan melanjutkan, pembangunan manufaktur Solar PV di Kendal menunjukkan semangat kolaborasi yang terus diupayakan PLN. Hal ini semata-mata untuk memaksimalkan potensi energi surya di Indonesia yang sangat besar, mencapai 207 Gigawatt (GW).

Kolaborasi seperti ini diharapkan bisa mengakselerasi skenario transisi energi pemerintah Indonesia yang ambisius, dengan target 75 persen penambahan kapasitas energi berasal dari energi terbarukan dan 25 persen sisanya dari gas alam pada tahun 2040.

Kesepakatan ini merupakan komitmen PLN guna mendukung pemerintah yang gencar mengundang investasi ke Tanah Air di bidang energi baru terbarukan.

"Forum seperti ini menunjukkan perubahan besar. Dari kita yang sebelumnya terfragmentasi, menjadi satu kesatuan. Ini sekaligus memberi kita keyakinan, apapun tantangannya, kita akan terus bergerak maju demi masa depan yang lebih baik," pungkaskan Darmawan.

Adapun forum China-Indonesia Business Forum yang merupakan bagian dari The Third Belt and Road Forum for International Cooperation (BRF) yang diinisiasi oleh Chamber of Commerce Committee Tiongkok.

BRF bertujuan menjalin kolaborasi dunia internasional yang meliputi konsultasi ekstensif, kontribusi bersama yang menguntungkan, menjalin kerja sama terbuka, hijau, bersih, dan berstandar tinggi untuk meningkatkan kehidupan masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan. (105)

IPI Sumbar Belum Memadai

PADANG - SINGGALANG

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Suwirpen Suib berharap Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI) di daerah ini, ke depan agar lebih ditingkatkan lagi. Soalnya, saat ini IPI Sumbar masih belum maksimal dan memadai.



FGD - Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, saat FGD terkait KPBU sebagai alternatif membangun kemandirian fiskal daerah, di Padang, Kamis (19/10/2023). (ist)

Sampai 2022, katanya, IPI Sumbar baru tergolong dalam kelompok menengah. Artinya, kondisi infrastruktur masih belum mantap dan memadai untuk mendukung percepatan pembangunan daerah.

Hal itu dikatakan Suwirpen saat Fokus Group Discussion (FGD) dengan Topik KPBU (Kerjasama Pemerintah Badan Usaha) sebagai Alternatif Mambangun Kemandirian Fiskal Daerah, di Padang, Kamis (19/10/2023).

Menurut dia, permasalahan utama dari belum memadainya infrastruktur di Sumbar disebabkan terbatasnya kemampuan keuangan daerah, untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur ini.

Betapa tidak, lanjutnya, pada APBD Tahun 2023 dengan nilai yang mencapai Rp 6,5 triliun, alokasi anggaran untuk belanja modal hanya berkisar 12 %, dan alokasi khusus untuk belanja infrastruktur tidak sampai 10 % dari total belanja daerah. Sebagian besar alokasi belanja habis untuk belanja operasi yang di dalamnya termasuk be-

lantja pegawai.

"Apabila kita hanya mengandalkan APBD sebagai sumber pendanaan pembangunan infrastruktur di daerah, maka butuh waktu yang lama untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur ini. Bisa 10 atau 20 tahun baru kita bisa memenuhinya dan itu pun tidak efektif untuk percepatan pembangunan daerah," tambah Suwirpen.

Mengharapkan sumber pembiayaan dari DAK pun saat ini, semakin sulit, oleh karena kebijakan dana transfer dari pemerintah ke daerah dalam beberapa tahun terakhir, semakin berkurang. "Hal ini tentu dapat kita pahami, oleh karena banyak juga beban negara untuk pemenuhan kebutuhan anggaran di sektor lainnya," sebutnya.

Oleh sebab itu, dibutuhkan kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur ini. Daerah harus pandai berinovasi mencari sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, baik dari potensi sendiri (APBD) mau-

pun melalui skema pembiayaan lainnya.

Dari banyak persoalan Sumbar dalam hal infrastruktur, Suwirpen berharap kegiatan FGD kali ini dapat melahirkan sebuah solusi yang dapat memajukan Sumbar.

Kegiatan FGD dihadiri Gubernur Sumbar, Mahyeldi, dan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Syukriah HG menyebut anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sumbar pada 2023 relatif kecil, hanya sekitar Rp1,4 triliun. Itu pun tersebar pada beberapa sektor.

"Jika hanya mengandalkan anggaran itu pembangunan di daerah akan berjalan lambat. Makanya, kita menawarkan pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU," ujarnya.

Agar pemerintah daerah memahami secara penuh tentang skema itu, maka pihaknya menghadirkan seluruh pihak berkompeten untuk memberikan penjelasan secara komprehensif.

la berharap skema itu bisa membantu Pemprov Sumbar dan kabupaten/kota dalam mempercepat pembangunan infrastruktur karena infrastruktur adalah faktor pendukung utama perekonomian. (401)

antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur dan/atau layanannya untuk kepentingan umum mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh pemerintah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko di antara para pihak.

"Ide menggunakan skema itu muncul setelah diskusi dengan Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumbar Syukriah HG yang langsung ditindaklanjuti dengan FGD ini," katanya.

la berharap dengan FGD ini semua pihak berkepentingan termasuk pemerintah kabupaten dan kota agar bisa lebih memahami mekanisme KPBU sekaligus kelebihan dan kekurangan menggunakan skema tersebut.

Sementara itu, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat Syukriah HG menyebut anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Sumbar pada 2023 relatif kecil, hanya sekitar Rp1,4 triliun. Itu pun tersebar pada beberapa sektor.

"Jika hanya mengandalkan anggaran itu pembangunan di daerah akan berjalan lambat. Makanya, kita menawarkan pembiayaan infrastruktur melalui skema KPBU," ujarnya.

Agar pemerintah daerah memahami secara penuh tentang skema itu, maka pihaknya menghadirkan seluruh pihak berkompeten untuk memberikan penjelasan secara komprehensif.

la berharap skema itu bisa membantu Pemprov Sumbar dan kabupaten/kota dalam mempercepat pembangunan infrastruktur karena infrastruktur adalah faktor pendukung utama perekonomian. (401)

Djohermansyah Sebut Dua Aspek Terkait Posisi Jakarta ke Depan

JAKARTA - Setelah DPR RI mengesahkan Undang-Undang tentang Ibukota Nusantara (UU IKN), maka tahapan pembangunan terus dilakukan, kendatipun akan ada pergantian presiden pada Pemilu 14 Februari 2024 mendatang.

Lalu bagaimana status Jakarta, maka sesuai UU No.3 tahun 2022 tentang IKN, maka Jakarta akan menjadi Ibu Kota transisi sampai presiden RI menjabat secara resmi menetapkan IKN.

Terkait hal ini, pengamat

Otonomi Daerah (Otda) Prof. Djohermansyah Djojan kepada awak media di Jakarta, Kamis (19/10/2023), menekankan dua aspek terkait desain Jakarta setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara.

Pertama, menurut mantan Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri ini adalah Jakarta harus ditempatkan sebagai daerah otonomi dalam satu level dengan IKN Nusantara di Kalimantan. "Kedua, jadikan dia (Jakarta) kota yang berfungsi sebagai kota

global. Untuk bisa menjadi kota global harus. Karena Jakarta itu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dan bisnis," ujarnya.

Terkait itu, status Jakarta sebagai global power city index sudah terpenuhi. Ada sejumlah indikator yang membuat Jakarta memenuhi syarat sebagai global city. Yaitu provinsi terpadat penduduknya. Karena Jakarta jumlah penduduknya lebih dari 10 juta plus Raya, Jakarta Raya dengan interlay yang mendukungnya itu yaitu Depok, Tangerang Selatan, Bekasi dan kota Tangerang.

Dari segi kontribusi perekonomian juga mampu mendukung ekonomi nasional. Seperti Jakarta yang mampu menyumbang paling besar terhadap perekonomian nasional, yaitu 17% dari perekonomian nasional.

Kawal UU IKN

Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati dalam Dialektika Demokrasi bertema "IKN Mengubah Status DKI, Bagaimana Status Jakarta?", bersama guru besar IIP/IPDN Djohermansyah Djojan, dan Humas IKN Troy Pantouw di Gedung DPR RI Senayan Jakarta, Selasa (17/10/2023), mengakui jika Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F- PKS), menolak UU IKN tersebut karena belum waktunya Indonesia pindah dan memiliki IKN.

Sedangkan status Jakarta, sesuai dengan UU IKN pasal 69 bahwa Jakarta, akan menjadi ibu kota transisi sampai ditetapkan IKN secara resmi oleh Presiden RI mendatang. "Untuk Jakarta, saya mendukung menjadi global city dan kini ada di peringkat 40 dunia, sebagai pusat bisnis dan perekonomian global. Hanya saja gubernur terpilih harus punya kewenangan yang kuat," ungkapnya.

Sementara itu Troy Pantouw menegaskan jika siapapun presiden yang terpilih pada 14 Februari 2024 atas perintah UU harus melanjutkan program pembangunan IKN tersebut. Dimana IKN akan menjadi smartcity, greencity (66%) lingkungan IKN tidak berubah, sehingga akan menjadi work vocation, dicapkan ten minuteduty, cukup jalan kaki antar kantor kelembagaan, dan sebagainya, yang kini pembangunan istananya sudah mencapai 28%.

Bagaimana Jakarta? Menurut Troy, Jakarta tetap memiliki keterkaitan dengan IKN. (ery)

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CABANG BUKITINGGI

Jl. Ahmad Yani No. 03 Bukitittinggi 26113 Sumatera Barat. Telp. (0752) 624777 - 624778 - 624782 Faksimile 34746
Kawat Cabri Bukitittinggi Telex 55438 - 55298 e-Mail c0015@bri.co.id

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 tahun 1996 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bukitittinggi selaku pemegang Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukitittinggi akan melaksanakan penjualan secara umum (lelang) eksekusi hak tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet (Closed Bidding) terhadap jaminan debitur dibawah ini, yaitu:

- Amrizal, berupa:**
Sebidang Tanah dan bangunan Rumah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya berdasarkan SHM No. 00091/Nagari III Koto Silungkang, Luas Tanah 295 M2 tercatat a.n. Elia Fatma, terletak di Jl. Ke Sekolah MIN 6 Agam, Jorong Gumarang, Nagari Tigo Koto Silungkang Kec. Palembang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat. (Nilai Limit Rp.170.000.000,- Uang Jaminan Rp.34.000.000,-).

Syarat-syarat Lelang:
1. Cara Penawaran.
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet (Closed Bidding), yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Syarat&ketentuan" pada domain tersebut.

- Pendaftaran.**
Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id/> dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut)
- Waktu Pelaksanaan.**
Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain dibawah ini sejak dimuat pada Aplikasi Lelang Internet sampai dengan:

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 3 November 2023
Batas Akhir Penawaran	: 10.00 Waktu Server Aplikasi Lelang Internet (Closed Bidding)
Alamat Domain	: https://www.lelang.go.id/
Tempat Lelang	: KPKNL Bukitittinggi,
	: Jl. Prof. Dr. M. Yamin, S.H. No. 60, Aur Kuning, Kota Bukitittinggi
Penetapan Pemenang	: Setelah Batas Akhir Penawaran

Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.

- Uang Jaminan Lelang.**
a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang seperti tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil)
- Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, dengan batas akhir penerimaan uang jaminan lelang:
Hari/tanggal : Kamis / 2 November 2023
b. Uang Jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Penawaran Lelang.**
Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan limit, penawaran lelang dapat dilakukan berkali kali.
- Pelunasan Lelang.**
a. Pemenang Lelang akan dimumkan di email dan menu status lelang masing-masing peserta.
b. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
- Semua Obyek lelang ditawarkan dalam kondisi apa adanya. Segala bentuk kekurangan/ kerusakan menjadi resiko dan tanggungan pembeli sepenuhnya. Pembeli dianggap sudah tahu kondisi objek lelang yang akan ditawarkan/dibel.
8. Pengusahaan Obyek lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang
9. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bukitittinggi Dan KCP Lubuk Basung, Telp. 0752-624777/624778, CP : Weno Kurnia Putra (081374011960), Widi Septian Yusuf (085274159133) dan KPKNL Bukitittinggi, Jl. Muhammad Yamin No. 60 Aur Kuning Bukitittinggi, Telp. 0752-34899.

Bukittinggi, 20 Oktober 2023
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG BUKITINGGI
Ttd
KURNIADI
Pemimpin Cabang

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
CABANG BUKITINGGI

Jl. Ahmad Yani No. 03 Bukitittinggi 26113 Sumatera Barat. Telp. (0752) 624777 - 624778 - 624782 Faksimile 34746
Kawat Cabri Bukitittinggi Telex 55438 - 55298 e-Mail c0015@bri.co.id

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan Pasal 6 UUHT No. 4 tahun 1996 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bukitittinggi selaku pemegang Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukitittinggi akan melaksanakan penjualan secara umum (lelang) eksekusi hak tanggungan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet (Closed Bidding) terhadap jaminan debitur dibawah ini, yaitu:

- LUSI HERMIWITA, berupa:**
Sebidang Tanah dan bangunan rumah berikut segala sesuatu yang ada di atasnya berdasarkan SHM No. 171/Kelurahan Campago Guguk Bulek, Luas Tanah 240 M2 tercatat a.n LUSI HERMIWITA, terletak di Jalan Nusa Indah RT 06, RW 01, Kelurahan Campago Guguk Bulek, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukitittinggi, Provinsi Sumatera Barat. (Nilai Limit Rp.850.000.000,- Uang Jaminan Rp.200.000.000,-).

Syarat-syarat Lelang:
1. Cara Penawaran.
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Lelang Internet (Closed Bidding), yang dapat diakses pada alamat domain <https://www.lelang.go.id/>. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Syarat&ketentuan" pada domain tersebut.

- Pendaftaran.**
Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://www.lelang.go.id/> dengan merekam serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dikembalikan langsung ke nomor tersebut)
- Waktu Pelaksanaan.**
Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain dibawah ini sejak dimuat pada Aplikasi Lelang Internet sampai dengan:

Hari	: Jum'at
Tanggal	: 3 November 2023
Batas Akhir Penawaran	: 10.15 Waktu Server Aplikasi Lelang Internet (Closed Bidding)
Alamat Domain	: https://www.lelang.go.id/
Tempat Lelang	: KPKNL Bukitittinggi,
	: Jl. M. Yamin No. 60 AurKuning, Bukitittinggi
Penetapan Pemenang	: Setelah Batas Akhir Penawaran

Peserta lelang diharapkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.

- Uang Jaminan Lelang.**
a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang seperti tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah nominal yang disetorkan harus sama dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini, disetorkan sekaligus (bukan dicicil)
- Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang, dengan batas akhir penerimaan uang jaminan lelang:
Hari/tanggal : Kamis / 2 November 2023
b. Uang Jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dikirimkan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas dinyatakan valid.
- Penawaran Lelang.**
Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan limit, penawaran lelang dapat dilakukan berkali kali.
- Pelunasan Lelang.**
a. Pemenang Lelang akan dimumkan di email dan menu status lelang masing-masing peserta.
b. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang 2% paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila wanprestasi atau tidak melunasi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara.
- Semua Obyek lelang ditawarkan dalam kondisi apa adanya. Segala bentuk kekurangan/ kerusakan menjadi resiko dan tanggungan pembeli sepenuhnya. Pembeli dianggap sudah tahu kondisi objek lelang yang akan ditawarkan/dibel.
8. Pengusahaan Obyek lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemenang lelang
9. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Bukitittinggi Telp. 0752-624777 / 624778, CP : Widi Septian Yusuf (085274159133), Hanry Budiman (081374011960) dan KPKNL Bukitittinggi, Jl. Muhammad Yamin No. 60 Aur Kuning Bukitittinggi, Telp. 0752-34899.

Bukittinggi, 20 Oktober 2023
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG BUKITINGGI
Ttd
KURNIADI
Pemimpin Cabang

STUDI BANDING KE DIY

Tim Pembahas Ranperda Perhutanan Sosial Peroleh Sejumlah Masukan



YOGYAKARTA - SINGGALANG

Tim pembahas rancangan peraturan daerah (ranperda) perhutanan sosial DPRD Sumatera Barat (Sumbar) terus melakukan penyusunan produk hukum tersebut. Salah satu prosedur yang mesti dilakukan salah satunya mempelajari tata kelola perhutanan sosial di provinsi lain. Untuk itulah tim pembahas yakni Komisi II DPRD Sumbar melaksanakan studi banding ke Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (16/10).

Ketua Komisi II, Mochlasin mengatakan studi banding tim pembahas ranperda perhutanan sosial ke Yogyakarta ini merupakan bagian dari penyempurnaan ranperda tersebut. Dari studi banding ke Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan DIY tersebut diperoleh sejumlah masukan. Mochlasin memaparkan, keluarnya Peraturan Presiden (PP) Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial dan Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Dari kedua peraturan tersebut dijelaskan bahwa, kegiatan



perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat umum adat sebagai pelaku utama. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan.

"Hingga kini, pemerintah memiliki dua agenda besar yang menjadi sorot utama terkait dengan pengelolaan hutan, yakni peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif," paparnya. Oleh karena itulah, lanjut Mochlasin, ranperda perhutanan sosial yang merupakan inisiatif DPRD Sumbar ini disusun. Tujuannya agar ranperda ini nantinya dapat memberikan dorongan percepatan mencapai tujuan pemerintah, yakni memastikan hutan sebagai sarana pengentasan kemiskinan masyarakat. Selain juga memastikan pengelolaan lahan, khususnya di sekitar hutan dapat dilakukan dengan model yang menciptakan keharmonisan antara peningkatan kesejahteraan dengan setaraan dan pelestarian lingkungan. "Program ini adalah program perhutanan Sosial di



Sumatera Barat," katanya.

Program perhutanan sosial sendiri kata Mochlasin bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pola pemberdayaan dan dengan tetap berpedoman pada aspek kelestarian.

Program ini akan membuka kesempatan bagi masyarakat di sekitar hutan untuk mengajukan hak pengelolaan area hutan kepada pemerintah. Setelah disetujui maka masyarakat dapat mengolah dan mengambil manfaat dari hutan dengan cara-cara yang ramah lingkungan. "Kami terus berusaha menyempurnakan ranperda ini. Nantinya kami juga akan berkonsultasi ke Kementerian LHK dan Kemendagri," katanya.

Dalam pertemuan tersebut, Kabid Planologi, Produksi, Perhutanan Sosial dan Penyuluhan Dinas LHK, DIY, Niken Aryat mengatakan kelompok perhutanan sosial DIY dimulai pada tahun 2007 dengan terbitnya IUPHKm.

Perhutanan sosial di DIY terdapat di dua kabupaten yaitu Gunungkidul dan Kulon Progo, dan tersebar di 12 kecamatan. Ini terdiri dari dua skema PS yaitu Hutan Kemasyarakatan (HKm) dan Hutan Tanaman Rakyat (HTR)

"HKm terdiri dari 42 KTH pemegang izin dengan total luas hutan 1.284,05 Ha, dengan rincian : Gunungkidul (35 KTH -> 1.087 Ha), Kulon Progo (7 KTH -> 197 Ha), HTR terdiri dari 3 koperasi pemegang izin (di dalamnya terdapat 5 KTH) dengan total luas hutan : 327,149 Ha.", ujarnya.

Niken memaparkan, kelompok perhutanan sosial di DIY (HKm dan HTR) membentuk dua paguyuban. Kedua paguyuban ini rutin melaksanakan pertemuan setiap tiga bulan sekali secara swadaya, yaitu: Bukit Seribu : paguyuban HKm dan HTR di Kabupaten Gunungkidul dan Lingkar : paguyuban HKm di Kabupaten Kulon Progo.

Selain itu, ada usaha tumpangsari tanaman pangan/food estate dengan luas tanaman 20.239 ha (bukan luas hamparan). Usaha inj

Senyumbang komoditas pertanian yaitu jagung 9.737 ton, ketela 20.331 ton, kacang 1.679 ton, kedelai 815 ton, padi 614 ton, HMT 13.475 ton.

"Bila dinilai dalam rupiah produksi tersebut senilai Rp60 miliar dengan pelaku pengembang (petani hutan). Selain tanaman pangan juga berkembang usaha budidaya tanaman bawah tegakan seperti empon-empon dan umbi-umbian yang dipasarkan secara luas," ungkapnya.

Untuk diketahui, sebelumnya Tim pembahas ranperda tentang perhutanan sosial juga mendapatkan sejumlah referensi untuk pengayaan ranperda tersebut saat studi banding ke Provinsi Jawa Barat, Selasa (6/6).

Salah satu hal yang akan diatur dan dimasukkan dalam muatan ranperda itu adalah, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaan hutan sosial.

"Ada beberapa hal yang akan kita masukan dalam pasal-pasal ranperda perhutanan sosial dari hasil studi banding ke Jawa Barat. Selain pengembangan SDM, ada juga tentang pendampingan petani pengelola hutan hingga pendanaan yang bersumber dari kementerian untuk aktivitas perhutanan sosial," ujar Ketua Tim Pembahas ranperda itu, Arkadius Dt. Intan Bano usai.

Dia mengatakan, untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan hutan sosial, dalam ranperda tersebut juga akan diatur tentang keterlibatan relawan-relawan untuk membantu pengembangan hasil hutan. Misalnya seperti budidaya atau pengrajin kopi (barista-red) hingga pemasarannya.

"Tujuannya agar lebih banyak terbuka lapangan kerja pada sektor perhutanan nantinya," ujarnya.

Tidak hanya penglibatan relawan, pencegahan konflik kawasan juga akan diatur dalam ranperda tersebut. Sehingga pengelola hutan sosial akan mendapatkan kepastian hukum, permodalan hingga pendampingan.

"Kita berharap regulasi ini mengarahkan pada kesejahteraan masyarakat," katanya.

Terkait studi banding ke Jawa Barat, tambah Arkadius, didasari oleh diserahkan 38 unit perhutanan sosial oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk lima skema kewenangan pengelolaan, ada hutan desa, kemasyarakatan, tanaman rakyat, adat dan kemitraan perhutanan.

Meski telah diserahkan oleh presiden, Jawa Barat belum memiliki Perda ataupun Pergub pengelolaan hutan sosial, jika berjalan lancar Sumbar menjadi provinsi pertama memiliki Perda perhutanan sosial. Pengelolaan sosial Jawa Barat telah mendesak gubernurnya untuk melahirkan Perda demi kepastian hukum pengelolaan.

"Namun secara keseluruhan konsep pengelolaan hutan sosial disana telah berjalan optimal. Sehingga perlu kita pelajari," ujarnya lagi.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar Irsyad Syafar yang mendampingi tim pembahas mengatakan, meski di

Sementara itu, Wakil Ketua tim Pembahas ranperda perhutanan sosial Muzli M. Nur memaparkan, perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hak hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat umum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraan, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya.

Berdasarkan rencana pembangunan jangka menengah nasional telah ditetapkan program perhutanan sosial seluas 12,7 juta hektare termasuk tentang skema pengelolannya yang terdiri dari hutan desa, hutan negara, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat serta kemitraan kehutanan.

"Selain di tingkat pusat, kebijakan ini juga diimplementasikan di tingkat Sumatera Barat sehingga perhutanan sosial menjadi isu strategis pembangunan jangka menengah sumbar yang merupakan bagian dari isu produktifitas dan nilai tambah sektor pertanian, kehutanan," ujarnya.

Kebijakan ini, tambah Muzli, sudah dimasukkan dalam dokumen rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Sumbar Tahun 2016-2021. Dalam RPJMD tersebut disebutkan bahwa perhutanan sosial merupakan salah satu upaya pemerintah daerah Sumbar dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup mengingat Sumbar memiliki kawasan hutan seluas lebih dari 2,2 juta hektare atau sekitar 54,4 persen dari luas provinsi Sumbar. (*)

